

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

Ila Pangestu

NPM. 1451020216

Program Studi: Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1439H/2018**

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Ila Pangestu

NPM. 1451020216

Program Studi: Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Pembimbing I : Dr. Asriani, SH., MH.

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

1439H/2018

ABSTRAK

Kontrak kerjasama *mudharabah* sangat rentan terhadap risiko yang disebabkan oleh adanya hubungan *principal-agent*. Model kontrak semacam ini dimungkinkan terjadinya ketidakseimbangan informasi antara *principal* (*shahibul maal*) dan *agent* (*mudharib*). Dalam hal ini akan muncullah masalah keagenan akibat dari informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*) dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih dari pada *principal*, sehingga *agent* berpotensi untuk melakukan tindakan penyimpangan. *Asymmetric information* dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana permasalahan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bagaimana upaya penanganan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari rumusan masalah yang tersebut di atas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah 12 nasabah pembiayaan *mudharabah* dan 3 orang karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang pada bagian *Small Medium Enterprise* (SME). Penelitian ini menggunakan metode analisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang penulis temukan yaitu permasalahan *adverse selection* yang dapat terjadi berupa menyembunyian informasi, karakter nasabah yang sulit diketahui, dan kesalahan dalam analisa. Sedangkan permasalahan *moral hazard* yang dapat terjadi adalah penyimpangan pada etika dan kontrak, serta penyimpangan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *adverse selection* adalah dapat memunculkan risiko gagal bayar sedangkan pada *moral hazard* dapat menurunkan kualitas pembiayaan sehingga akan berpotensi pada menurunnya nasabah pembiayaan *mudharabah*. Maka dari permasalahan tersebut dapat dilakukan upaya penanganan dengan melakukan *screening*, verifikasi, *monitoring*, dan penerapan etika syariah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah permasalahan *asymmetric information* yang terjadi di BNI Syariah KC Tanjung Karang yaitu, masalah *adverse selection* berupa kesalahan dalam menganalisa oleh pihak bank dan menyembunyian informasi oleh nasabah yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi. Masalah *moral hazard* berupa penyimpangan terhadap penggunaan dana pembiayaan dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak bank dan kurangnya etika syariah dari nasabah. Dampak negatif yang ditimbulkan pada masalah *adverse selection* adalah potensi gagal bayar, sedangkan pada masalah *moral hazard* adalah penurunan kualitas pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank melakukan upaya penanganan berupa *screening*, verifikasi, dan *monitoring*.

Kata kunci: Pembiayaan *mudharabah*, *asymmetric information*, *adverse selection*, *moral hazard*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG
KARANG**

Nama : Ila Pangestu

NPM : 1451020216

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. Asriani, SH.MH.

NIP. 196605061992032001

Pembimbing II,

Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

NIP. —

Ketua Jurusan

Ahmad Habibi, SE. M.E.

NIP. 197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**, Oleh: **Ila Pangestu, NPM: 1451020216, Jurusan: Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 14 Mei 2018**.

TIM MUNAQSAH

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.

Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I : Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**Dr. Moh Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241989031003**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya (juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS Al-Anfal (8) : 27)



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukabumi; Yayasan At-Tartil), h. .180.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sri Mulyono dan Ibu Ida, yang selalu memberikan semangat, cinta kasih yang tulus serta selalu memberikan doanya setiap waktu. Berkat dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat, kesehatan, keberkahan, kemurahan rizki, dan sisa umur yang bermanfaat, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal'alamiin.*
2. Seluruh keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan nasehat, doa serta dukungannya dalam segala hal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan yang tak terhingga.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ila Pangestu. Dilahirkan di Ambon pada tanggal 9 Desember 1996. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sri Mulyono dan Ibu Ida, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SD Negeri 4 Gapura, Kotabumi tahun 2002-2008.
2. SMP Negeri 1 Kotabumi tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 3 Kotabumi tahun 2011-2014

Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG”**. Sholawat teriring salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu perbankan syariah.

Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian.

3. Ibu Asriani, S.H., M.H. dan Ibu Yulistia Devi, M.S.Ak. selaku pembimbing yang telah mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga barokah atas semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi dan referensi yang sangat bermanfaat.
6. Pimpinan dan staf PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian yang sangat bermanfaat.
7. Teman seperjuangan Perbankan Syariah khususnya kelas E angkatan 2014 yang telah berjuang bersama dalam melewati proses perkuliahan hingga proses skripsi. Sahabat-sahabatku yang luar biasa Ervia Nina S, Desi Noviana Eka P, Anugerah Sahvitri H, dan Yeni Lestari yang selalu memberikan motivasi, dan bantuannya dalam segala hal. Semoga ilmu yang kita raih bersama dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Serta sahabat-sahabat kebaikan Ibu Dyah Etika WS, Livia Danisha P, Alwina Putri D, Aulia Larasati, Fitri Wahyuni, beserta seluruh keluarga besar Komunitas Sahabat Sedekah Lampung yang telah mensupport dan mengajarkan untuk mengasihi sesama dengan berbagi. Semoga dapat selalu memberikan manfaat kepada sesama dan selalu diberkahi Allah SWT.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan dalam bidang khazanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 16 Maret 2018

Penulis

Ila Pangestu
NPM. 1451020216

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
I. Tinjauan Pustaka.....	18
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah.....	20
B. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	25
C. <i>Asymmetric Information</i>	29
D. Pembiayaan.....	38
E. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
 BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT Bank BNI Syariah	63
B. Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	72
 BAB IV. ANALISIS DATA	
A. Permasalahan <i>Asymmetric Information</i> pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	78
B. Dampak dari <i>Asymmetric Information</i> pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	94
C. Penanganan <i>Asymmetric Information</i> pada	

Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	96
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tinjauan Pustaka

Tabel 3.1 : Sejarah Singkat BNI Syariah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung

Karang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Blanko Konsultasi

Lampiran 3 : Surat Riset

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “**Analisis *Asymmetric Information* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan Penanganannya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**”.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
2. *Asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor yang mempunyai sebagian informasi dan yang lainnya tidak memiliki.³
3. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*⁴
4. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 58.

³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 107.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul adalah sebagai berikut:

1. Alasan Secara Objektif

Ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) merupakan tantangan utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*. *Asymmetric information* dapat menimbulkan aktivitas *advers selection* dan *moral hazard* yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh bank syariah guna mencegah kerugian yang akan terjadi dengan melakukan upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut.

2. Alasan Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dan literatur yang dibutuhkan seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan seperti objek penelitian yakni produk pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah KC Tanjung Karang.

⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240.

- c. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam persoalan-persoalan terkait *asymmetric information*.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu dari lembaga perbankan di Indonesia adalah perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau dengan kata lain lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁶ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁷

Perbankan syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah mulai berkembang sejak payung hukum yang berevolusi secara bertahap. Mulai UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2.

⁷ Fahmi Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 25.

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah hadir sebagai solusi atas keinginan masyarakat muslim untuk menghindari sistem bunga dan praktek riba. Yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an adalah mutlak haram sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275:⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Pembahasan mengenai riba dalam ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mayoritas ahli tafsir (*jumhur al-mufasssirin*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al'athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukabumi: Yayasan At Tartil), h. 516.

menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah SWT atas pemberiannya itu.⁹

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sistem perbankan berbasis syariah menggunakan konsep pembagian baik keuntungannya maupun kerugian yang disebut mekanisme bagi hasil. Konsep prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip tersebut bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun peminjam dana. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil yang ditentukan sebelumnya.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam lima akad utama yaitu: *syirkah a' mal*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah mufawadhah*. Namun yang banyak dipakai di bank syariah, diberi nama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Kedua akad produk tersebut biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.¹⁰

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 paragraf 6, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

⁹ Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Al Qur'an dan Literatur Fikih", *Jurnal Islamic of Economics*, Vol. III, No. 2, Juli 2011, h. 294.

¹⁰ Muhammad, 2014, *Op. Cit*, h. 239.

sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Dengan kata lain pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.¹¹

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak merupakan solusi yang Islami untuk mencapai kepentingan bersama. Karena dalam akad ini pemilik modal dengan keterbatasannya dalam hal waktu, kesempatan, dan keterampilan bisa mendapatkan hasil investasi dari kinerja wirausahawan yang mengelola dana.

Akan tetapi bagi hasil *mudharabah* kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti. Sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah nasional menggunakan akad *murabahah* atau skim pembiayaan jual beli dengan *mark up*. Hanya negara Iran (48%) dan Sudan (62%) yang memberikan porsi terbesar pada skim pembiayaan dengan sistem bagi hasil.¹²

Muhammad mengemukakan bahwa dalam praktiknya signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank perannya sangat lemah, hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya: masalah

¹¹Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta; Salemba Empat, 2016), h. 110.

¹²Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak *Mudharabah* dan Alternatif Solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, September 2008, h. 480.

standar moral, ketidakefisienan model pembiayaan bagi hasil dan kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis.¹³

Pada hubungan kontrak bisnis *mudharabah* diperlukan saling keterbukaan antara pemilik dana (*principals*) dan nasabah (*agents*) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Dengan konsep pembiayaan yang mendasarkan pada kejujuran kedua belah pihak menjadikan pembiayaan *mudharabah* sangat sulit dijalankan.¹⁴ Model kontrak semacam ini dimungkinkan sarat dengan terjadinya *imperfect information* dengan hubungan antara *principal* (*shahibul maal*) dan *agent* (*mudharib*), maka muncullah masalah agensi. Masalah agensi ini akan muncul ketika terdapat *asymmetric information* dari *agent* terhadap *principal*.¹⁵

Asymmetric information menjadi tantangan utama lembaga keuangan syariah. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan maka dapat terjadi aktivitas *adverse selection* dan *moral hazard*.¹⁶ Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan fenomena kecilnya angka pembiayaan *Mudharabah*. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan bentuk dari masalah *asymmetric information*.

¹³ Muhammad, *Op. Cit*, h. 108.

¹⁴ Muhammad, "Penyesuaian Masalah Agensi (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Unisia UII* (Yogyakarta: 2009), h. 3.

¹⁵ Muhammad, *Op. Cit*, h. 167-169.

¹⁶ Muhammad, 2009, *Loc. It*.

Asymmetric information adalah suatu kondisi dimana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pada pihak lain.¹⁷ Munculnya *asymmetric information* pada kontrak *mudharabah* karena *mudharib* sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek yaitu:¹⁸

1. *Mudharib* men-desain kontrak dengan *shahibul maal*, sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk meng-observasi permintaan maupun produktivitas usaha.
2. Hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan *shahibul maal*.

Secara teori, kontrak pembiayaan tidak akan dibuat dalam kondisi *asymmetric information*. Namun, kontrak antara bank dan peminjam akan ditandatangani hanya jika terdapat rasa percaya, utamanya dari pihak bank terhadap peminjam. Dasar kepercayaan ini bergantung pada dua hal penting yaitu:¹⁹

1. Nama baik atau reputasi peminjam sebagai warga masyarakat, dan
2. Tersedianya cukup aset (*assets*) dan agunan (*collateral*) sebagai jaminan apabila terjadi pembiayaan macet.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa masalah agensi muncul sebagai dampak buruk dari *asymmetric information*, sehingga jika dampak buruk tersebut dikurangi maka masalah agensi juga mestinya akan berkurang.

¹⁷Zaenal Arifin, "Pengaruh *Asymmetric Information* Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi". *Jurnal Sinergi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2007, h. 168.

¹⁸Friyanto, "Pembiayaan *Mudharabah* Risiko dan Penanganannya". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 2, September 2013, h. 113.

¹⁹Zainal Arifin, *Op. Cit*, h. 2.

Maka dalam hal ini diperlukan adanya kelengkapan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan *asymmetric information* agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan terhadap dampak buruk yang akan terjadi.

BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang memiliki komponen aset dengan kontribusi terbesar diantaranya disumbang dari produk piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Namun pada data laporan keuangan BNI Syariah akad dengan angka tertinggi adalah *murabahah*, dikarenakan tingkat risikonya yang tergolong rendah.

BNI Syariah mendukung kebutuhan dunia usaha dengan memberikan fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja serta pembiayaan lain yang diperlukan, yaitu dengan menghadirkan produk Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial dengan beberapa produk yang terhimpun didalamnya yaitu: BNI Griya Swakarya iB Hasanah, BNI Mikro 3 iB Hasanah, Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah, Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah, dan Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah.²⁰

Pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah dijalankan dengan produk BNI *Linkage Program* iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh BNI Syariah dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah yang kemudian disalurkan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BNI Syariah, Pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah mempunyai 12 nasabah, dengan rincian nasabah 3 BPRS dan 9 Koperasi. Kemudian dari nasabah BNI *Linkage*

²⁰ Annual Report BNI Syariah, Part 2, 2017, h. 70.

Program tersebut terdapat nasabah yang terdeteksi melakukan tindakan penyimpangan dalam hal kegiatan (*hidden action*) yang dapat memunculkan *moral hazard*.

Kendati demikian BNI Syariah secara terus menerus berupaya menjaga kualitas perkembangan usaha debitur secara berkesinambungan. Selanjutnya BNI Syariah terus melakukan program perbaikan dan penyelesaian atas debitur bermasalah. Sehingga BNI Syariah tetap dapat menjaga eksistensi pembiayaan *mudharabah*nya hingga sekarang ini. Namun hingga sekarang ini, angka pembiayaan *mudharabah* tetap rendah.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati lebih dalam tentang *asymmetric information* pada BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis *Asymmetric Information* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan Penanganannya Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang”**.

D. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup pada objek penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dengan skema *linkage program*. Pembiayaan *mudharabah* pada penelitian ini disalurkan kepada Lembaga Keuangan Syariah berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
3. Bagaimana upaya penanganan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjabarkan bagaimana permasalahan *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang.
2. Untuk menjabarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang.
3. Untuk menjabarkan bagaimana penanganan atas *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada Perbankan Syariah, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya di BNI Syariah KC Tanjung Karang, serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dalam ilmu perbankan dan menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima penulis dalam menjalankan studi perkuliahan.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penetapan strategi dalam mengatasi masalah *asymmetric information* dan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dengan melihat pada faktor-faktor penyebabnya

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah.²² Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Yang difokuskan pada permasalahan *asymmetric information*, dampak serta upaya penanganannya pada pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan tentang permasalahan *asymmetric information*, dampak serta upaya penanganannya pada pembiayaan *mudharabah*. Adapun data tersebut diperoleh dari PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

²²*Ibid*, h. 7.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dibagian pembiayaan.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari referensi lain seperti dokumen, jurnal dan buku-buku seperti: buku Pembiayaan Bank Syariah karangan Wangsawidjaja, Manajemen Dana Bank Syariah karangan Muhammad, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan karangan Adiwarman A. Karim, dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, Jalan Jendral Sudirman No. 62, Kelurahan Enggal, Kota Bandar Lampung.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

²⁴ *Ibid*

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵

Adapun populasi dari penelitian ini adalah nasabah pembiayaan BNI Syariah *Linkage Program* yaitu sebanyak 12 nasabah dan pegawai BNI Syariah KC Tanjung Karang pada bagian *Small Medium Enterprise* (SME) yaitu sebanyak 3 orang. Oleh karena populasi relatif kecil atau sedikit, maka penulis menggunakan total sample yaitu 15 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi nonpartisipan, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan²⁶ tentang permasalahan *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya di BNI Syariah KC Tanjung Karang.

b. Interview (wawancara)

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

²⁵ *Ibid*, h. 115.

²⁶ *Ibid*, h. 204

Wawancara dilakukan dengan karyawan BNI Syariah pada bagian *Small Medium Enterprise* (SME). Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya di BNI Syariah KC Tanjung Karang .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷

6. Metode Analisa Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai cara-cara dan tahapan yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dalam menghadapi permasalahan *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* serta upaya penanganannya pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

²⁷ *Ibid*, h. 422.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁸ Dengan mereduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.²⁹ Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 431.

²⁹ *Ibid*, h. 434.

³⁰ *Ibid*, h. 438.

I. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Andy Fathur Rahman	Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Analisis Deskriptif Kualitatif	Faktor-faktor penyebab terjadinya <i>moral hazard</i> , yaitu <i>asymmetric information</i> , lemahnya integritas manajerial atau rendahnya kualitas karakter nasabah, terbatasnya cakupan isi kontrak, dan tidak optimalnya sistem monitoring.
Nur Anisha	Indikasi Moral Hazard Dan Adverse Selection Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus: Bank Syariah Periode Januari 2012-Februari 2012)	Analisis Statistik, Regresi Berganda	indikasi <i>moral hazard</i> pada Bank Syariah yang ditunjukkan oleh pembiayaan bermasalah merupakan akibat dari pengaruh nilai GDP, inflasi, dan rasio margin <i>murabahah</i> terhadap margin <i>mudharabah</i> . Indikasi <i>adverse selection</i> ditunjukkan oleh meningkatnya nilai pembiayaan bermasalah dari meningkatnya tingkat bagi hasil.
Refaat Zharfan	Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal Agent dalam Pembiayaan	Analisis Deskriptif Kualitatif, Field Research	Permasalahan <i>principal-agent</i> terjadi karena adanya penyimpangan-penyimpangan berupa <i>asymetric information</i> dalam pembiayaan produktif dengan akad <i>mudharabah</i> dapat

	Mudharabah Pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar		diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan, yaitu berupa pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah tahun 2018

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:

1. Andy Fathur Rahman dalam penelitiannya membahas tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya *moral hazard* saja, dalam penelitian ini dibahas lebih luas tentang masalah *asymmetric information*.
2. Nur Anisha dalam penelitiannya meneliti tentang *moral hazard* yang terindikasi dari pembiayaan bermasalah, dalam penelitian ini *moral hazard* dan *adverse selection* dilihat dari perilaku penyimpangan yang dilakukan nasabah.
3. Refaat Zharfan dalam penelitiannya meneliti tentang masalah *principal agent* berupa *asymmetric information* dan pencegahannya, sedangkan penelitian ini meneliti tentang masalah *asymmetric information* dan penanganannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.³¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³²

Dengan demikian, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa perbankan lainnya yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang telah diatur dalam syariah Islam yaitu terbebas dari hal-hal yang mengandung unsur kedzaliman,

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

³² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktik*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 21.

riba (bunga), *maisyr* (spekulasi), *gharar* (ketidak jelasan), serta terbebas dari perkara yang bathil.

2. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema *non-riba* memiliki setidaknya empat fungsi yaitu:³³

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

³³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 48.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

3. Tujuan Bank Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah yang diutarakan dalam berbagai pendapat diantaranya yaitu:

Menurut Kazarian tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dalam hal ini bank syariah lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim.³⁴

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³⁵

Sementara itu para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial.³⁶

Jadi tujuan dari bank syariah adalah memberikan fasilitas keuangan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak yaitu antara golongan surplus dan golongan

³⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

³⁵ Rizal Yaya, *Loc. Cit.*

³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 33.

defisit agar kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu golongan saja. Tujuan dari bank syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam dimana sistem keadilan dijunjung tinggi dan lebih mementingkan kesejahteraan bersama sehingga tidak terlalu berfokus kepada profit yang akan didapatkan.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah

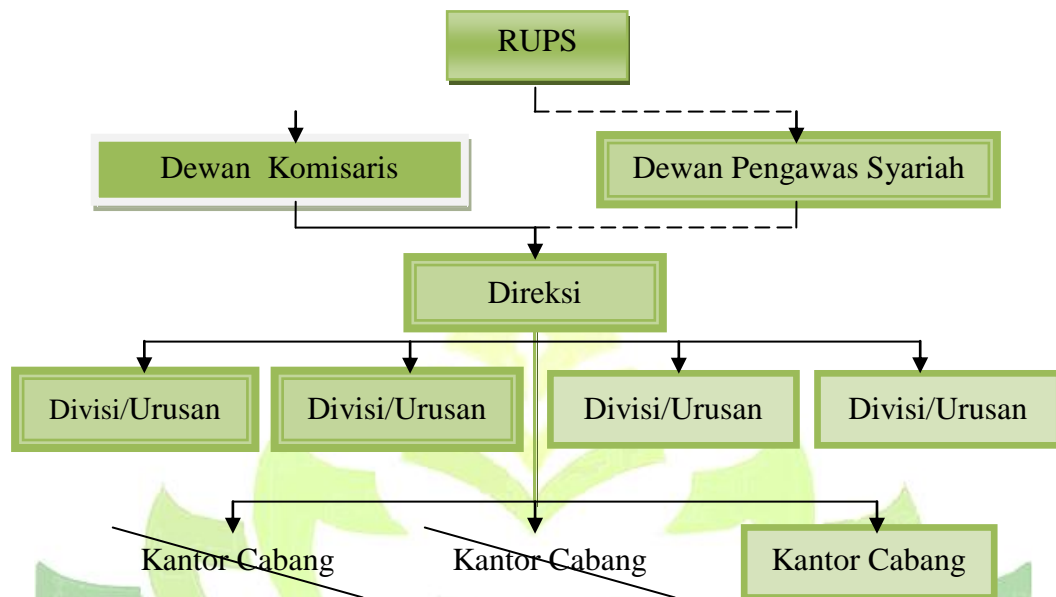
Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengurus Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.³⁷ Berikut adalah contoh struktur organisasi dari bank syariah:³⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

³⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 30.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 11.

Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Gambar 2.1
Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Sumber: Bank Indonesia (2000:1)

B. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling mengatakan bahwa *agency Theory* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan.³⁹

Menurut Eseinhardt *agency theory* menjelaskan tentang hubungan organisasional antara *pricipal* dengan agen. Dalam *agency theory*, agen diaharapkan dapat memenuhi kepentingan *principal*, namun agen dalam hal ini sering mengambil keputusan dan menjalankan keputusan yang tidak

³⁹ Michael C. Jensen, William H. Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structer". *Journal of Financial Economic*, Vol. 3, No. 4, P. 308.

sesuai dengan kepentingan *principal*. Hubungan *principal-agent* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain.⁴⁰

Dalam *agency theory* (teori keagenan), terdapat dua pihak yang berbeda, yakni majikan dan agen. Teori ini mendekati masalah dengan menganalisis interaksi antara dua individu ketika kewenangan, tindakan, dan kegiatan majikan didelegasikan kepada agen karena kompetisinya yang spesifik. Majikan selalu ingin agar agen melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkannya. Namun, antara majikan dan agen cenderung terdapat perbedaan karena alasan berikut; Pertama, agen memiliki informasi yang tersembunyi dan hanya dia yang mengetahuinya. Kedua, agen dan majikan memiliki keinginan dan/atau tujuan yang berbeda sehingga timbul benturan kepentingan. Ketiga, agen dan majikan sering memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.⁴¹

Maharani menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal – agent* yaitu; pertama, ketika pihak *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. *Agent* yang seharusnya menjalankan amanah *principal* telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*. Kedua, sulit dan mahal bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*.

⁴⁰ Aswadi Lubis, "Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah". *Jurnal Al Qalam*, Vol. 33, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 52.

⁴¹ Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 293.

Ketiga, masalah pembagian risiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan risiko yang ditanggung.⁴²

Secara khusus Algoud *et.al* menyebutkan bahwa masalah keagenan pada kontrak *mudharabah* berasal dari tiga sumber yaitu: pertama, tidak adanya syarat jaminan yang akan memperburuk problem *adverse selection*. Menurut teori perbankan Islam dana yang disediakan berdasarkan kontrak *profit loss sharing* terutama akan mendorong para pengusaha baru yang tidak memiliki aset apapun selain usaha (tenaga) dan keahlian mereka, tanpa jaminan digolongkan memiliki risiko tinggi. Kedua, kontrak *mudharabah* akan cenderung memunculkan *moral hazard* karena perbankan syariah tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai, selain itu juga tidak membatasi aktivitas pengusaha dengan menentukan intensitas usahanya. Ketiga, karena pengeluaran perusahaan seluruhnya ditanggung oleh perbankan syariah.⁴³

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kontrak *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama antara *principal* dan *agent* yang sarat dengan masalah keagenan, yaitu model aksi tersembunyi (*moral hazard*) dan model informasi yang tersembunyi (*adverse selection*) yang dapat berupa nasabah menggunakan dana tidak seperti yang tertera pada kontrak dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur. Dalam hal-hal seperti itulah yang kemudian akan memunculkan konflik keagenan.

⁴² Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak *Mudharabah* dan Alternatif solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, September 2008, h. 483.

⁴³ Aswadi Lubis, *Op. Cit*, h. 53.

Kemudian Eisenhardt berpendapat bahwa konflik keagenan bisa diatasi dengan membuat pembatas yang akan terbentuk dengan adanya beberapa kondisi antara lain; pertama, kontrak antara majikan dan agen itu berlandaskan hasil yang dapat dicapai dan digariskan dengan jelas; kedua, majikan memiliki segala informasi yang diperlukan untuk memverifikasi tingkah laku agen.⁴⁴ Batasan tersebut merupakan pembatas bagi sikap oportunis agen yang kerap menjadi pemicu masalah keagenan.

Manziliati mengungkapkan bahwa *monitoring* merupakan simbol penting dalam interaksi pada kerjasama *mudharabah* untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *hidden information*. Melalui *monitoring shahibul maal* mendapatkan informasi yang benar apakah nasabah bisa dipercaya telah mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk investasi tersebut, juga apakah nasabah selalu menjaga amanah dengan bertindak jujur selalu melaporkan hasil yang diperoleh dengan tidak membesar-besarkan biaya sehingga keuntungan menjadi kecil.⁴⁵

Berdasarkan beberapa kutipan teori di atas masalah keagenan dapat diatasi dengan melakukan beberapa tindakan yaitu; pertama, melakukan *monitoring* untuk dapat mengetahui kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh *agent* dan memastikan apakah *agent* mengelola modal dan menjalankan usahanya dengan baik; kedua, *principal* mengetahui informasi yang cukup dan memadai untuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha

⁴⁴ Hendy Herijanto, *Op. Cit*, h. 294.

⁴⁵ Asfi Manziliati, "Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah Dalam Kerangka Teori Keagenan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 2, Mei 2011, h. 289.

yang dijalankan oleh *agent*; ketiga, *principal* memberikan sejumlah batasan-batasan terhadap *agent* yang seringkali bertindak oportunis dan menyalahgunakan wewenang dalam mengelola modal yang diberikan oleh *principal*.

C. *Asymmetric Information*

Asymmetric information merupakan suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Seharusnya prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya transparan sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tetap tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen.⁴⁶

Muhammad mengatakan bahwa *asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.⁴⁷ *Asymmetric information* ini merupakan akibat bahwa pasar keuangan atau kredit tidak memiliki informasi yang sempurna. Di lain pihak, bank membutuhkan banyak informasi terutama mengenai (calon) debitur selama pinjaman belum dilunasi. Bank sebagai calon kreditor, dan salah satu pihak dalam perjanjian kredit yang akan dibuat, tidak memiliki

⁴⁶ Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory dalam Perspektif Islam", *Jurnal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011.

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 367.

informasi yang sama seperti pihak lainnya, yaitu calon debitur atau debitor peminjam.⁴⁸

Asymmetric information merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*. Penyimpangan ini diminimalisasi dalam rangka mengoptimalkan hasil. Hal ini dapat terjadi jika ada penetapan struktur insentif. Presley & Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah*, yang dikenal dengan *incentive-compatible constraint*. Dengan kata lain, masalah penting yang perlu dicermati dalam kontrak *mudharabah* adalah memperkecil terjadinya *asymmetric information*. *Asymmetric information* ini merupakan bagian dari masalah agensi dalam suatu kontrak keuangan.⁴⁹

Pada beberapa situasi dalam masalah keagenan mungkin agen mengeluarkan sumber daya (biaya pengikat) untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyukai tindakan-tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi ganti rugi jika agen mengambil tindakan yang demikian. Meskipun demikian, secara umum adalah mustahil bagi prinsipal ataupun agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Di sebagian besar hubungan keagenan, prinsipal dan agen akan mengeluarkan biaya pengawasan dan ikatan yang positif dan sebagai

⁴⁸ Hendy Herijanto, *Op. Cit*, h. 54.

⁴⁹ Muhammad, "Penyesuaian Masalah Agensi (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah". *Jurnal Unisia UII* (Yogyakarta: 2009), h. 3.

tambahan akan ada perbedaan antara keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.⁵⁰

Maka berdasarkan uraian di atas masalah *asymmetric information* dapat terjadi jika antara prinsipal dan agen memiliki perbedaan kepentingan yang hendak dituju dan sebagian besar dari kontrak merupakan keputusan-keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal sebagai pemilik modal karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa, sehingga hal ini dapat mendorong agen melakukan tindakan-tindakan penyimpangan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, serta karena adanya perbedaan antara tingkat risiko yang ditanggung oleh prinsipal dan agen. Prilaku penyimpangan yang dilakukan agen dapat berupa penyembunyian informasi yaitu dengan merekayasa kinerja perusahaan ataupun tidak jujur dalam menyampaikan informasi tentang hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan kinerja yang telah dilakukan. Kemudian penyimpangan lainnya adalah agen dapat melakukan tindakan yang berbeda dari yang telah disetujui pada kontrak kerja ataupun memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

permasalahan *asymmetric information* juga dapat diatasi dengan prinsip-prinsip agama yang dapat digunakan sebagai pengendali diri agar seseorang tidak berbuat bohong (*hazard*), tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hasil usaha yang diperoleh. Hal tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak *mudharabah* dapat menjalankannya dengan benar

⁵⁰ Mariska Dewi Anggraeni, *Op. Cit.*

dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan *moral hazard*.⁵¹

Asymmetric information dapat terjadi berupa kegiatan maupun informasi. Masalah yang berkaitan dengan kegiatan dinamakan *hidden action*, sedangkan masalah yang berkaitan dengan informasi disebut *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*.⁵²

1. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.⁵³

Sedangkan menurut Miskhin *adverse selection* merupakan permasalahan *asymmetric information* yang terjadi sebelum disalurkan kredit/pembiayaan.⁵⁴ *Adverse selection* adalah etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal⁵⁵ dan merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih *entrepreneur*

⁵¹ Muhammad, *Op. Cit*, h. 3.

⁵² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 169.

⁵³ Mariska Dewi Anggraeni, *Loc. Cit*.

⁵⁴ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 50, dikutip oleh Refaat Zharfan. "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal Agent* dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar". (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), h. 28.

⁵⁵ Muhammad, 2005, *Loc. Cit*.

yang akan diberikan kredit/pembiayaan.⁵⁶ Hal ini dikarenakan pemilik dana/*shahibul maal* tidak mengetahui dengan pasti karakteristik *mudharib*.

Adverse selection juga dikatakan sebagai masalah yang timbul dalam melakukan seleksi nasabah sebelum melakukan kontrak kredit atau pembiayaan dilakukan. Calon nasabah yang berisiko tinggi tentunya tidak akan pernah jujur mengatakan bahwa unit usaha yang diajukan kreditnya tergolong tinggi.⁵⁷ Dalam hal ini informasi yang tidak sempurna dapat keliru menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hanya mengungkapkan sisi yang baik saja, sehingga menjadi penyebab kredit bermasalah, kredit yang seharusnya ditolak diputus setuju.⁵⁸

Tingkat *adverse selection* berhubungan langsung dengan tingkat *asymmetric information* dan ketidak lengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya dan terjadi hasil maksimal, maka pihak bank syariah – sebagai *principal* – perlu melakukan upaya-upaya pencegahan (*adverse selection*), misalnya melalui: *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening*

⁵⁶ Refaat Zharfan, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Misnen Ardiansyah, “Bayang-bayang Teori Keagenan pada Kontrak Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”. *Jurnal wawancara Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, h. 262.

⁵⁸ Iis Kurniasari Rivai, “Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, September 2013, h. 1141.

atas proyek; membuat kontrak yang lengkap (*complete contract*), misalnya tentang: jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan.⁵⁹

Untuk mengatasi permasalahan *adverse selection*, pihak bank/*shahibul maal* perlu mengetahui karakteristik *mudharib*. Melalui analisis atas dokumen yang diajukan *mudharib*, *shahibul maal* bisa memperoleh sebagian informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik *mudharib*. Karakteristik *mudharib* tersebut dapat diketahui dengan tepat melalui suatu verifikasi yang berbiaya relatif besar.⁶⁰

Maka berdasarkan uraian di atas *adverse selection* merupakan permasalahan yang terjadi sebelum disalurkan pembiayaan dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan oleh *mudharib* sehingga *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik *mudharib*. Permasalahan *adverse selection* ini dapat diatasi dengan melakukan analisis atas dokumen yang diajukan *mudharib* lalu melakukan verifikasi terhadap kebenaran dari informasi yang diberikan oleh *mudharib*.

⁵⁹ Muhammad, 2005, *Op. Cit*, h. 170.

⁶⁰ Refaat Zharfan. "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal Agent* dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar". (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), h. 30.

2. *Moral Hazard*

Istilah *moral hazard* menjadi populer semenjak terjadinya krisis Asia 1997/1998, yang menunjuk pada keadaan yang mendorong terjadinya pemberian kredit yang terlalu agresif dan sembrono, dan gagal menerapkan analisis kredit dan pengawasan yang memadai.⁶¹

Moral hazard pada pasar keuangan terjadi ketika kreditor dihadapkan pada *hazard*, dan debitor memiliki dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dari segi pandangan kreditor. *Moral hazard* terjadi jika debitor tidak memiliki dorongan yang cukup untuk mengelola sumber daya modal sebaik mungkin untuk tujuan tertentu, atau mengubah tujuan penggunaan pinjaman, atau menggunakan pinjaman untuk investasi berisiko tinggi, atau melakukan misalokasi dana untuk keperluan pribadi.⁶²

Sebuah penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab dari munculnya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk terdorong melakukan *moral hazard*, serta tidak optimalnya sistem *monitoring*.⁶³

Permasalahan *moral hazard* biasa terjadi pada kondisi dimana *mudharib* bersifat *risk-averse* (cenderung menghindari risiko). Ia akan lebih memilih level upaya di tingkat yang hanya sekedar memenuhi

⁶¹ Hendy Herijanto, *Op. Cit.*, h. 296.

⁶² *Ibid*, h. 29

⁶³ Andy Fatur Rahman, "Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*". (Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 114.

tingkat utilitas minimalnya saja. Untuk mengatasi ini, pemilik dana dapat memberikan insentif yang sesuai agar *mudharib* bersedia untuk meningkatkan level upayanya.⁶⁴

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan.⁶⁵ *Moral hazard* juga dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini *mudharib* akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya.⁶⁶ Untuk selanjutnya *moral hazard* akan membuat risiko dari pembiayaan sistem bagi hasil menjadi meningkat karena ketidakpastian (*uncertainty*) dan pendapatan yang rendah serta tidak menarik.⁶⁷

Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* khususnya *moral hazard* adalah perlunya dilakukan *monitoring* dan verifikasi atas upaya *mudharib*.⁶⁸ *Monitoring* diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*earling warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara

⁶⁴ Refaat Zharfan, *Op. Cit*, h. 33.

⁶⁵ Friyanto, “Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 2, September 2013, h116.

⁶⁶ Misnen Ardiansyah, *Op. Cit*, h. 264.

⁶⁷ Salman Syed Ali, “Islamic Capital Market: Product, Regulation, and Developments”. *Proceedings Paper of Internasional Conference, IRTI*, 2008, h. 241, dikutip oleh Andy Fathur Rahman, “Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*”. (Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2010), h.5.

⁶⁸ Misnen Ardiansyah, *Op. Cit*, h. 263.

debitur/*mudharib* dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit/pembiayaan untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan dan salam kebijakan perkreditan bank.⁶⁹

Untuk mengatasi *moral hazard* yang mungkin terjadi pada tingkat (calon) debitor, bank harus melakukan langkah-langkah prinsip kehati-hatian sejak suatu permohonan kredit akan diproses. Langkah yang paling awal adalah melakukan pengecekan reputasi, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan uji tuntas secara saksama, kemudian setelah kredit diberikan, bank harus melakukan pengawasan atau kepedulian (*due care*), dengan tujuan agar pinjaman yang diberikan tidak berkembang menjadi bermasalah (NPL).⁷⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa *moral hazard* merupakan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*, dikarenakan *mudharib* melakukan tindakan yang bertentangan dengan kontrak perjanjian pembiayaan atau tidak menggunakan modal pembiayaan yang diberikan dengan sebagaimana mestinya. Masalah *moral hazard* dapat diatasi dengan melakukan monitoring terhadap *mudharib* dengan tujuan untuk mengetahui apakah *mudharib* menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh *shahibul maal* agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

⁶⁹ Friyanto, *Op. Cit*, h. 177.

⁷⁰ Hendy Herijanto, *Op. Cit*, h. 299.

D. Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus dapat berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal). Sedangkan aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank Islam.⁷¹

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*turst*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.⁷²

Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

⁷¹ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 680.

⁷² Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷³

Menurut penulis pembiayaan adalah suatu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh *shahibul maal* kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan asas kepercayaan. Penyaluran dana yang diberikan ini dalam rangka mendukung peningkatan daya produksi dan aktivitas investasi yang telah direncanakan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:⁷⁴

a. Pembiayaan menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

⁷³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 41.

⁷⁴ Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, h. 686.

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :⁷⁵

- a. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

- a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan poyek, pembiayaan ekspor.

- b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

⁷⁵ *Ibid*, h. 687-689.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.

Aplikasi: pembiayaan investasi/ barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

c) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Aplikasi: pembiayaan konstruksi/ proyek/ produk manufakturing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan dengan pembiayaan:

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Aplikasi : pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/ wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan :

1) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Diantara beberapa jenis pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan yang kurang diminati dalam aktivitas bisnis yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sedangkan pembiayaan

murabahah adalah yang paling banyak diminati. Hal ini dikarenakan dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti.⁷⁶ Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang kurang diminati oleh para nasabah, dikarenakan peranannya dalam memainkan investasi dana bank sangat lemah.

Pembiayaan *mudharabah* berjalan berdasarkan prinsip kepercayaan antara pihak pemodal dan pengusaha sehingga menyebabkan tingkat risiko pembiayaan yang sangat tinggi. Dalam *mudharabah* permasalahan yang sangat mungkin terjadi adalah *asymmetric information*, yaitu dapat berupa tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha (nasabah) berupa *adverse selection* dan *moral hazard*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁷⁶ Muhammad, 2005, *Op. Cit*, h. 111.

3. Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan di Bank Islam

Kredibilitas sebuah bank Islam berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas bank Islam meliputi antara lain unsur-unsur:⁷⁷

- a. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut ini:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.” (QS An-Nahl (16):105).⁷⁸

- b. Kesiediaan untuk berposisi “sama-menang” (*win-win*) dengan nasabah.

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada

⁷⁷ Veithzal Rivai, 2010, *Op. Cit*, h. 690.

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukabumi: Yayasan At Tartil), h. 279.

*takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah (5) : 8).*⁷⁹

- c. Ketaatan dalam memenuhi atau mematuhi aspek-aspek legal yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS Al-Maidah (5) : 1)⁸⁰

- d. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya...” (QS Al-Baqarah (2) : 282).⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, h. 108.

⁸⁰ *Ibid*, h. 106.

⁸¹ *Ibid*, h. 48.

- e. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut ini:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS Al-Isra’ (17):15).⁸²

4. Etika pelaksanaan pembiayaan

Upaya mempersiapkan kualifikasi bank Islam tidak terlepas dari komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalankannya. Tantangan sekaligus peluang besar yang memerlukan perjuangan dengan nilai ibadah yang tinggi, perlu secara terus-menerus dilakukan oleh kalangan lembaga keuangan. Maka dari itu pejabat bank Islam sebagai suatu profesi perlu menjunjung tinggi kode etik pejabatan pembiayaan bank Islam, sebagai berikut: ⁸³

- Patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
- Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.
- Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.

⁸² *Ibid*, h. 283.

⁸³ Veithzal Rivai, 2010, *Op. Cit*, h. 697.

- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan diri dari setiap kebijakan yang diterapkan bank terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan apa pun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan profesinya.

5. Pengamanan Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan. Pengamanan pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁴

a. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlakukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

⁸⁴ Muhammad, 2016, *Op. Cit*, h. 188.

b. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

E. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-qur'an, sunnah, maupun Ijma',⁸⁵

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus

⁸⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 204.

mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.⁸⁶

Ulama' Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*, yaitu berasal dari kata *qiradh* yang berarti al-*Qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.⁸⁷

Definisi menurut fiqh, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁸⁸

Definisi teknis keuangan, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁸⁹

Dengan demikian akad *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana yang menyetorkan modalnya kepada pengelola usaha, dengan ketentuan hasil dan keuntungan yang akan dibagi

⁸⁶ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis *Mudharabah* (Teori dan Praktik)". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. 58.

⁸⁷ Mahmudatus Sa'diyah, dan Meuthiya Athifa Arifin, "*Mudharabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, h. 303.

⁸⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240.

⁸⁹ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemilik dana.

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis yaitu:⁹⁰

a. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan *mudharabah terikat* (*restricted mudharabah*). Dalam praktik perbankan, *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Sementara itu *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut.

⁹⁰ Rizal Yaya, *Op. Cit*, h. 110.

b. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. *Mudharabah muthlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah terikat* (*unrestricted mudharabah*).

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudhaarabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusi dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi.

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pihak satu dan pihak lainnya dan untuk mencari karunia Allah SWT di muka bumi. sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menpatkan kamu di bumi dan di sana Kami sedikan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.” (QS Al-A’raf (7): 10).⁹¹

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS Al-Muzzamil (73): 20).⁹²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS Al-Jumu’ah (62): 10).⁹³

Pada ayat diatas menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara untuk mendapatkan rezeki yang halal salah satunya

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Op. Cit* , h. 151.

⁹² *Ibid*, h. 575.

⁹³ *Ibid*, h. 554.

dengan cara mengadakan perikatan syariah berbasis *mudharabah*.⁹⁴

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Sedangkan pada surah Al-Jumu'ah:10 adalah mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁹⁵

b. Al-Hadits

Adapun dasar hukum dari pembiayaan *mudharabah* yang bersumber dari hadits yang memperbolehkan dilakukannya pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁹⁶

Dari Syu'aib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) Muqaradah (nama lain dari *mudharabah*), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

"Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya." (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al-Hakam).

c. Ijma'

Adapun sumber hukum *ijma* yang merangkan tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu:

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).⁹⁷

⁹⁴ Firdaweri, *Op. Cit*, h. 61.

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁹⁶ Muhammad, 2014, *Op. Cit*, h. 241.

⁹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit*.

d. Qiyas

Mudharabah diqiaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁹⁸

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, baik dari al-Qur an, hadis, ijihad shahabat, ijma', dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.⁹⁹

- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1.¹⁰⁰
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).¹⁰¹
- g. Peraturan Bank Indonesia¹⁰²

⁹⁸ Firdaweri, *Op. Cit*, h. 65.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 195.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Muhammad, 2015, *Op. Cit*, h. 43.

- 1) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transpransi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya.
- 3) PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 dan 7.¹⁰³
- 4) SE.BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bagian III angka 1.¹⁰⁴

4. Rukun dan syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *mudharabah*:¹⁰⁵

- a. Pelaku, yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

¹⁰³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 223.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Muhammad, 2014, *Op. Cit*, h. 244.

b. Pernyataan *ijab-qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan lagi hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

5. Ketentuan Penyaluran Dana *Mudharabah*

Ketentuan dalam penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* pengelola usaha.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 243.

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* atau yang disebabkan oleh bencana alam, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

6. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut merupakan fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah*:¹⁰⁷

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan menerima bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan seperti laporan keuangan yang telah di audit.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.¹⁰⁸
- f. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

¹⁰⁷ Muhammad, 2015, *Op. Cit*, h. 41.

¹⁰⁸ Muhammad, 2014, *Op. Cit*, h. 246.

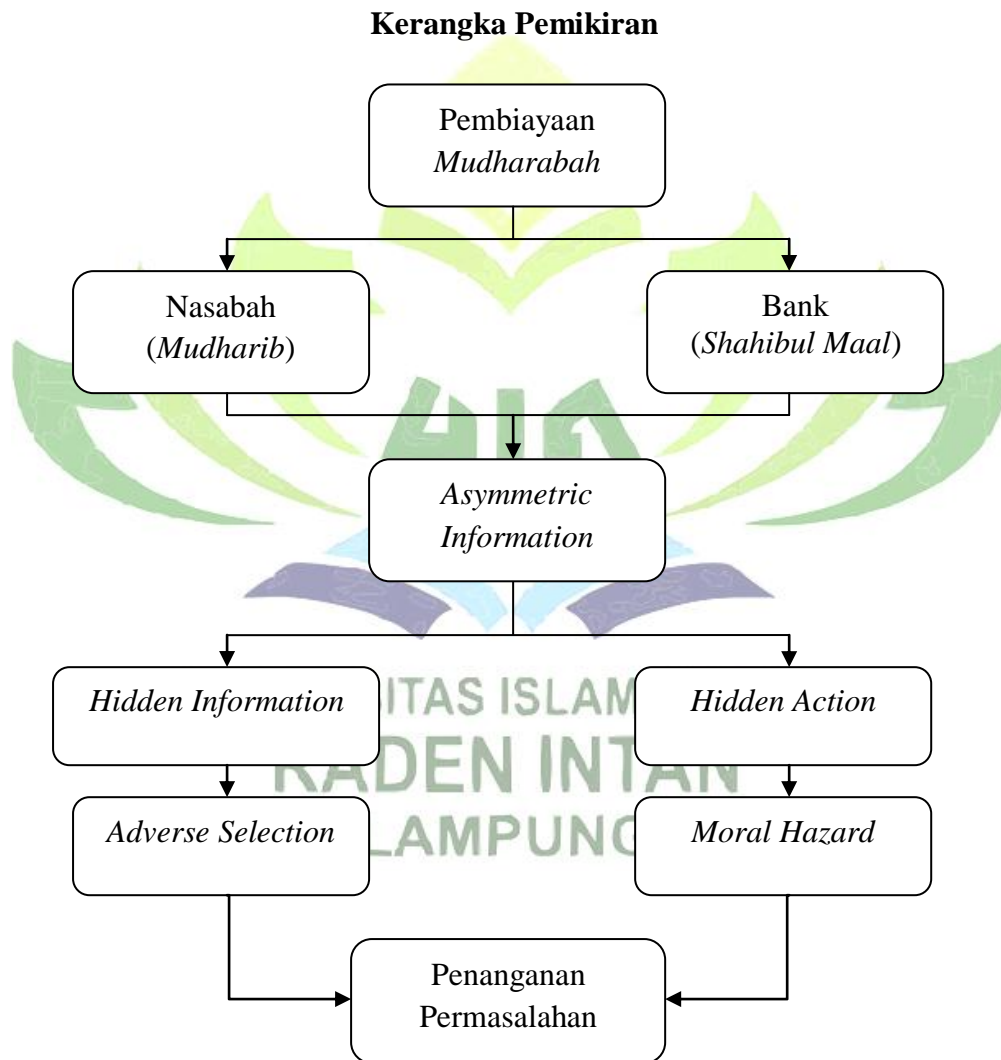
- g. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- h. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- j. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- k. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).
- m. Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pengelola dana.¹⁰⁹
- n. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, ditunjukkan oleh:¹¹⁰
- 1) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 247.

¹¹⁰ *Ibid*.

- 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*).
- 3) Putusan dari Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah tahun 2018

Keterangan:

Dalam pembiayaan *mudharabah* dapat terjadi masalah keagenaan berupa *Asymmetric Information*. *Asymmetric Information* dapat terjadi berupa kegiatan maupun informasi.¹¹¹ Masalah yang berkaitan dengan informasi dinamakan *hideen information* yang akan memunculkan *adverse selection*, masalah ini dapat terjadi pada saat dilakukannya penilaian pembiayaan dan kontrak setelah *mudharib* mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Masalah yang berkaitan dengan kegiatan dinamakan *hidden action* yang akan memunculkan *moral hazard*, masalah ini dapat terjadi pada saat berjalannya pembiayaan *mudharabah* yaitu ketika dilakukannya *monitoring* dan verifikasi, pelaksanaan usaha, pembukuan, dan laporan. Kemudian setelah terjadinya masalah-masalah tersebut BNI Syariah akan melakukan tindakan penanganan pada permasalahan *asymmetric information* yang terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹¹¹ Muhammad, 2005, *Op. Cit*, h. 169.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum PT Bank BNI Syariah

1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan bank umum pemerintah pertama yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.¹¹²

Berdasarkan hasil keputusan Direksi Tanggal 18 April 2005 dan surat keputusan Direksi No.KP/712/DIR/R tanggal 26 April 2005 maka telah ditetapkan sistem manajemen Bank BNI Syariah yang didesain secara berbeda dengan unit-unit bisnis yang ada di Bank BNI.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum

¹¹² Website resmi PT Bank BNI Syariah: www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 20.00 WIB.

Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point serta 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama.¹¹³

Perkembangan sejarah singkat BNI Syariah secara lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Sejarah Singkat BNI Syariah

No	Tahun	Keterangan
1	2000	PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan membuka 5 kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
2	2002	BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru di kota Medan dan Palembang. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp. 7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.
3	2003-2004	Berturut-turut Unit Usaha Syariah (UUS) BNI mendapatkan penghargaan sebagai “ <i>The Most Profitable Islamic Bank</i> ” diantara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan Unit Usaha Syariah (UUS).

¹¹³ *Ibid.*

4	2009	Pembentuk Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tanggal 19 Maret 2009 Tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.
5	2010	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 BNI Syariah berhasil membuka aset sebesar Rp. 6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.
6	2011	PT Bank BNI Syariah membuka laba Rp. 66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas serta lebih dari 1.000 Syariah <i>Channeling Outlet</i> BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp. 8,4 triliun pada akhir Desember 2011.
7	2012	Pencapaian aset Rp. 10 triliun pada 10 November 2012. <i>Outlet</i> BNI Syariah mikro mulai beroperasi, penambahan <i>outlet regular</i> 10 cabang BNI Syariah memperoleh <i>award</i> sebanyak 16 penghargaan selama tahun 2012. Logo BNI Syariah disemua <i>outlet</i> BNI dan ATM BNI sebagai sinergi dengan induk. Perbaikan dan efisiensi system internal. CASA terbaik diantara seluruh perbankan syariah.

Sumber : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembukaan kantor cabang BNI Syariah di Tanjung Karang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan dan memiliki 38 pegawai tetap dan 30 pegawai *outsourcing* yang dipimpin oleh Bapak Ichsan Mahyudi. Kantor cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki BNI Syariah dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Tanjung Karang

ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang pasar pusat Tanjung Karang yang dihadiri oleh Gubernur Sjachroedin Z.P, Wali Kota Bandar Lampung Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka Agama Tanjung Karang. BNI Syariah siap memasuki pasar awal 2010.¹¹⁴

BNI Syariah Bandar Lampung memiliki 2 Kantor Cabang yaitu KC Tanjung Karang dan KC Mikro Teluk Betung serta 5 Kantor Cabang Pembantu yaitu KCP Bandar Jaya, KCP Mikro Pringsewu, KCP Mikro Antasari, dan KCP Unit 2 Banjar Agung.

2. Profil PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

a. Profil Perusahaan

Nama : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung
Karang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 62 Bandar
Lampung

Tanggal Awal Beroperasi: 21 Juli 2005

Jumlah Karyawan : 70 Karyawan

Kegiatan Usaha : Bergerak di Bidang Usaha Perbankan
Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar
BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret
2010.

¹¹⁴ Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, 2017.

b. Letak Geografis

Lokasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah Bandar Lampung, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No. 62 Bandar Lampung. Terletak di lingkungan penduduk yang mengandalkan kehidupan perdagangan, bisnis dan pengusaha.

3. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah Insya Allah membawa berkah.¹¹⁵

b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.¹¹⁶

¹¹⁵ Website resmi PT Bank BNI Syariah, *Op. Cit.*

¹¹⁶ *Ibid.*

4. Produk dan Layanan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung

Karang

a. Produk simpanan

Adapun produk simpanan yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

- 1) Tabungan BNI iB Hasanah
- 2) Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa
- 3) Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota)
- 4) Tabungan BNI iB Hasanah (*Classic*)
- 5) Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah
- 6) Tabungan BNI Prima iB Hasanah
- 7) BNI Tabunganku iB Hasanah
- 8) Tabungan BNI Tapanas iB Hasanah
- 9) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
- 10) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah
- 11) Tabungan BNI Simple iB Hasanah
- 12) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
- 13) BNI Giro iB Hasanah
- 14) BNI Deposito iB Hasanah

b. Produk Pembiayaan Konsumer

Adapun Produk Pembiayaan Konsumer yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah

- 2) Pembiayaan BNI Griya *Musyarakah Mutanaqisah* (Griya-MMQ) iB Hasanah
- 3) Pembiayaan BNI *Oto* iB Hasanah
- 4) Pembiayaan BNI *Rahn* Emas iB Hasanah
- 5) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
- 6) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
- 7) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
- 8) Pembiayaan BNI *Cash Collateral Financing* iB Hasanah
- 9) BNI Mikro iB Hasanah
- 10) BNI Griya Swakarya iB Hasanah
- 11) iB Hasanah Card

c. Produk Pembiayaan Komersial

Adapun Produk Pembiayaan Komersial yang disediakan oleh

BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
- 2) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
- 3) Pembiayaan BNI *Linkage Program* iB Hasanah
- 4) Pembiayaan Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai iB Hasanah
- 5) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah
- 6) Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
- 7) Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
- 8) Pembiayaan *Multifinance* BNI iB Hasanah
- 9) Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah

10) Anjak Piutang iB Hasanah

11) Penjaminan iB Hasanah

12) Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah

d. Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

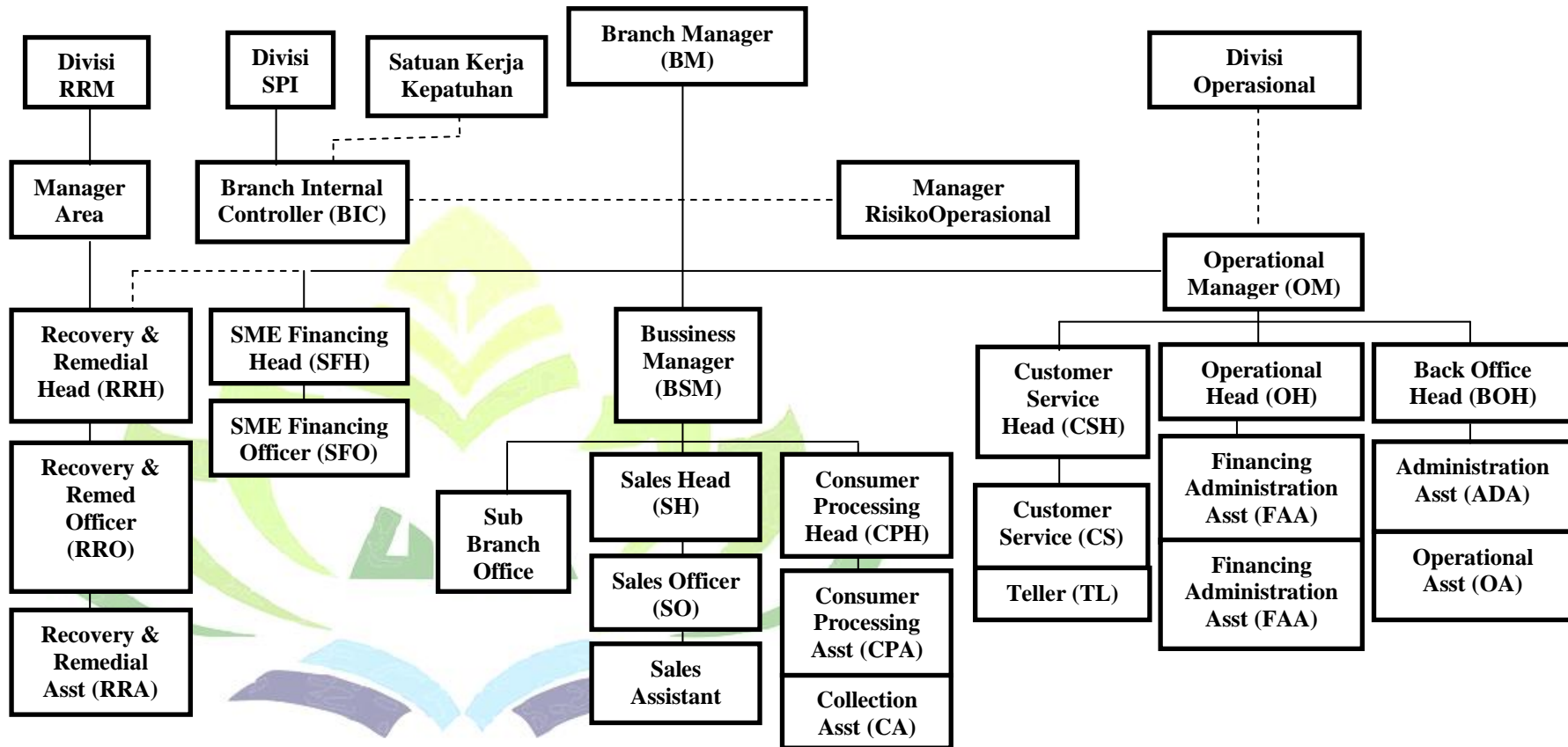
- 1) Kiriman Uang (KU)
- 2) Inkaso
- 3) Kliring
- 4) Layanan *Phoneplus*
- 5) ATM BNI
- 6) Gadai Emas BNI Syariah

5. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :¹¹⁷

¹¹⁷ Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, *Op. Cit.*

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang



Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Sumber: Arsip BNI Syariah

B. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang diaplikasikan dalam bentuk produk Pembiayaan *Linkage Program* iB Hasanah yang merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Baitul Maal at Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dll, untuk suatu usaha produktif yang kemudian akan diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.¹¹⁸ Berikut merupakan beberapa ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah:

1. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam peyaluran dana ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

¹¹⁸ Website resmi PT Bank BNI Syariah, *Op. Cit.*

3. Tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dan pengusaha).
4. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara BNI Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
5. Nisbah bagi hasil ke Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di BNI Syariah, sedangkan tarif ke *end user* ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a.
6. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
7. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
8. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
9. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

10. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
11. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
12. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
13. Akad pembiayaan ke Lembaga Keuangan Syariah adalah *mudharabah* sedangkan akad pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah ke *end user* sesuai dengan kebutuhan (*murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah*).
14. Lembaga Keuangan Syariah berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
15. Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan Syariah tidak tergolong dalam daftar *Black List* serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.

Dalam penyaluran Pembiayaan *Linkage Program* ini, BNI Syariah KC Tanjung Karang menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak terlepas dari peraturan syariah yang berlaku. Dalam mengajukan pembiayaan nasabah akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan *account*

officer yang bersangkutan. Berikut merupakan prosedur pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang:¹¹⁹

1. Lembaga Keuangan Syariah datang kepada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembiayaan *Linkage Program* yang ditandatangani seluruh pengurus sebagai bukti persetujuan seluruh pengurus.
 - b. Menyerahkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengurus, akta pendirian dan perubahan perusahaan.
 - c. Legalitas usaha lengkap yang masih berlaku berupa SIUP, TDP, HO, dan SITU.
 - d. Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.
 - e. Menyerahkan copy NPWP an. perusahaan dan pengurus.
 - f. Menyerahkan Fotokopi rekening bank selama 6 bulan terakhir (bila ada).
 - g. Menyampaikan laporan keuangan 3 tahun terakhir. (pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M).
 - h. Daftar nominatif *end user*, merupakan data nasabah yang akan menerima pembiayaan yang diperoleh dari pengajuan pembiayaan *Linkage Program* BNI Syariah. Dari daftar nominatif tersebut

¹¹⁹ Rudi Winanda, SME *Financing Head* BNI Syariah KC Tanjung Karang, Wawancara, pada tanggal 31 Januari 2018.

dicantumkan data *end user* berupa: nama, alamat, nomor telpon, besar pembiayaan, tujuan penggunaan, dan akad yang digunakan.

- i. Data-data lain sesuai kebutuhan analisa.

Kemudian untuk memastikan kebenaran data yang didapat dari hasil wawancara tersebut *account officer* bisa secara langsung memantau keadaan nasabah atau mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal nasabah.

3. OTS (*on the spot*) yaitu bank menilai kelayakan langsung perusahaan yang mengajukan pembiayaan dengan mendatangi langsung atau *survey* langsung ke perusahaan yang akan dilakukan oleh bagian *Small Medium Enterprice* dan pegawai lain yang terkait. Dalam tahapan ini *account officer* harus mencari informasi apakah pembiayaan investasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak dan sekaligus mencari informasi bagaimana kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya.
4. Analisa layak atau tidaknya diberikan pembiayaan. Dalam menganalisa suatu pembiayaan pihak bank akan melakukan analisa kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) yang dikembangkan. Kemudian bank akan melakukan analisa kondisi perusahaan calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Selanjutnya, analisa yang dilakukan biasanya berhubungan dengan etika, apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah benar-benar sesuai dengan syariah. Selanjutnya, bank juga harus mampu menganalisa manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Kedua,

analisa dilakukan oleh *support* pembiayaan yaitu bagian administrasi dan pembiayaan hukum (legal) yang tugasnya menganalisa yuridis secara hukum atas profil nasabah/perusahaan, analisa jaminan, dan taksasi jaminan.

5. Surat keputusan pembiayaan, yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh pihak bank yang berisi tentang persetujuan pembiayaan dengan memuat sejumlah persyaratan dan ketentuan tertentu yang harus disepakati oleh nasabah.
6. Penandatanganan surat persetujuan pembiayaan di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Yaitu setelah selesai analisa dan distujui oleh pihak bank.
7. Pencairan pembiayaan. Dalam melakukan pencairan pembiayaan *Linkage Program* maka setiap pejabat seksi administrasi pembiayaan harus memperhatikan dengan seksama mengenai dokumentasi, keterangan tentang jaminan, dan proses persetujuan. Pencairan dana dapat dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi dan diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat hukum.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan produktif yang dijalankan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada pihak defisit yang membutuhkan dana (nasabah). Pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* ini adalah pembiayaan dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Khususnya jika dilihat dari hukum yang tidak memperbolehkan jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lalai atau dengan sengaja melakukan kesalahan. Sehingga dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi.

Pembiayaan produktif di BNI Syariah KC Tanjung Karang yang menggunakan akad *mudharabah* adalah produk Pembiayaan *Linkage Program* iB Hasanah. *Linkage program* merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing*. Yang dimaksud pola *executing* disini adalah di mana BNI Syariah menyalurkan dananya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu berupa Koperasi Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan nasabah Pembiayaan *Linkage Program* iB Hasanah di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Kemudian dana yang telah diberikan kepada

Lembaga Keuangan Syariah tersebut akan diteruskan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

Hal yang melatarbelakangi adanya pembiayaan ini adalah karena salah satu pembiayaan produktif yang bersifat modal kerja. Pembiayaan *linkage program* ini telah dijalankan sejak berdirinya BNI Syariah Tanjung Karang. Hingga sekarang nasabah pembiayaan *linkage program* pada BNI Syariah KC Tanjung Karang berjumlah 12 Lembaga Keuangan Syariah, dengan rincian 3 Koperasi Syariah dan 9 BPRS. Dimana salah satu dari koperasi tersebut merupakan Koperasi Syariah karyawan BNI Syariah KC Tanjung Karang.¹²⁰

Dalam menjalankan pembiayaan berakad *mudharabah* tersebut BNI Syariah KC Tanjung Karang perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi agar pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi BNI Syariah sendiri. Tingginya risiko pada pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan tersebut memberikan 100% modal kepada nasabah dan kemudian pendapatan yang diterima oleh bank tidak tetap karena pendapatan yang diterima dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang pada bagian *Small Medium Enterprise* (SME) diperoleh informasi

¹²⁰ Andin Dwi Y, SME Account Officer BNI Syariah KC Tanjung Karang, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2018.

bahwa angka pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya. Dilihat dari adanya *survey market* seluruh bank yang ada di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan pada segmen *linkage program* mempunyai angka gagal bayar yang meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya risiko pada pembiayaan berakad *mudharabah*, sehingga pihak BNI Syariah harus menjadi lebih selektif dengan menetapkan sejumlah persyaratan tertentu guna mendapatkan nasabah pembiayaan yang kredibel. Dengan demikian pihak bank berharap dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan.¹²¹

Risiko yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam menjalankan pembiayaan berakad *mudharabah* merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya hubungan *principal-agent*. Hubungan ini merupakan hubungan antara bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah permasalahan yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak bank dan pihak nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah yang menjalankan usahanya cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak bank. Dikarenakan nasabah sebagai pengelola usaha yang dibiayai oleh bank tentu lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi dari usaha tersebut. Sedangkan

¹²¹ *Ibid.*

pihak bank hanya berperan sebagai pemberi modal dan melakukan pembinaan serta pengawasan secara berkala. Artinya, tingkat kejujuran dan keamanan dari nasabah dalam mengelola dana dari pembiayaan *mudharabah* masih dirasa kurang.

Asymmetric information yang terjadi dapat berupa *adverse selection* dan *moral hazard*. Permasalahan *adverse selection* dapat terjadi sebelum berjalannya akad pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan permasalahan *moral hazard* akan terjadi pada saat telah berlangsungnya akad pembiayaan *mudharabah*.

1. *Adverse Selection* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan selalu dihadapkan dengan masalah *Principal-Agent*. Hal ini tentu berlaku pula untuk BNI Syariah KC Tanjung Karang yang menggunakan akad *mudharabah* pada salah satu pembiayaannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BNI Syariah adalah permasalahan dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Tingginya risiko yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan berakad *mudharabah* menyebabkan BNI Syariah KC Tanjung Karang menetapkan persyaratan dan standar analisis yang lebih ketat dibandingkan pembiayaan produktif lainnya.

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa *adverse selection* adalah masalah yang timbul dalam melakukan seleksi nasabah sebelum kontrak kredit atau pembiayaan dilakukan. Calon nasabah yang berisiko tinggi tentunya tidak akan pernah jujur mengatakan bahwa unit usaha yang diajukan kreditnya tergolong tinggi.¹²² Hal ini mengindikasikan bahwa sulitnya bagi pihak bank untuk mengetahui karakteristik yang sesungguhnya dari calon nasabah pembiayaan *mudharabah*, dikarenakan penyembunyian informasi yang dilakukan calon nasabah dalam upayanya meyakinkan pihak bank bahwa usaha yang dijalannya layak untuk dibiayai.

Teori selanjutnya mengatakan bahwa permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal – agent* diantaranya yaitu sulit dan mahal nya bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*.¹²³ Hal ini dapat diartikan bahwa pemicu timbulnya masalah *asymmetric information* adalah sulitnya pihak bank dalam mengetahui karakter maupun kondisi yang sesungguhnya dari nasabah, yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan verifikasi yang harus dilakukan oleh pihak bank.

a. Penyembunyian Informasi

Dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pihak bank harus dapat memprediksi usaha nasabah yang akan dibiayai

¹²² Misnen Ardiansyah, "Bayang-bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, h. 262.

¹²³ Satia Nur Maharani, "Menyibak *Agency Problem* pada Kontrak *Mudharabah* dan Alternatif Solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, September 2008, h. 483.

oleh bank. Usaha nasabah yang akan dibiayai oleh bank harus memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya sehingga akan menghasilkan profit yang besar. Bank syariah akan memprediksi bagaimana profit yang akan dihasilkan oleh calon nasabah, apabila tidak sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dibutuhkan oleh bank maka bank tidak akan membiayai usaha calon nasabah tersebut. Dalam kondisi seperti ini nasabah akan dihadapkan pada risiko bahwa dirinya tidak akan memperoleh pembiayaan jika mengatakan dengan benar karakteristiknya. Maka dapat terjadi kemungkinan bahwa nasabah akan memberikan informasi yang tidak sesuai untuk dapat meyakinkan pihak bank bahwa usahanya layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Permasalahan *adverse selection* yang terjadi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah pada saat sebelum berjalannya pembiayaan, yaitu ketika nasabah memberikan informasi tentang kondisi perusahaannya, dalam hal ini nasabah akan melakukan tindakan *hidden information*. Nasabah akan memanipulasi informasi tentang kondisi yang sesungguhnya dari perusahaannya, baik dari kondisi keuangan maupun kemampuan perusahaan dalam mengelola usaha. Informasi perusahaan yang disampaikan oleh nasabah kepada pihak bank disampaikan dengan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya. Dengan tujuan agar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat diterima oleh bank.

Masalah *adverse selection* yang terjadi pada BNI Syariah terkait nasabah yang memanipulasi informasi perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan nasabah dengan menampilkan data keuangan yang seolah-olah baik kondisinya, dengan aset yang besar, rasio utang dan modal yang juga baik. Hal ini dapat dibuktikan pihak bank dengan melakukan survei langsung ke lapangan, sehingga dapat dilihat kebenaran tentang informasi dari nasabah tersebut.

Apabila informasi yang diberikan nasabah terbukti tidak benar maka nasabah tersebut tidak dapat diusulkan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Maka pada kondisi seperti ini bank akan menyampaikan keputusannya dalam bahasa yang baik dengan mengatakan bahwa bank belum bisa membiayai nasabah tersebut.

b. Karakter Nasabah yang Sulit Diketahui

Permasalahan *adverse selection* selanjutnya adalah sulitnya mengetahui karakter dari kepribadian nasabah yang sesungguhnya dan kemampuan nasabah dalam mengelola dana yang akan diberikan oleh bank.

Dimana dalam menyeleksi pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pihak bank hanya mengandalkan pada verifikasi informasi mengenai data diri calon nasabah yang dibuatnya. Tentu saja hal ini belum cukup untuk mengungkapkan karakter dan kemampuan sesungguhnya dari nasabah pembiayaan *mudharabah* yang akurat,

dikarenakan hanya nasabah sendiri yang mengetahui kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalaninya.

Kemudian bank juga perlu melakukan pengecekan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Usaha nasabah yang akan dibiayai oleh pihak bank haruslah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Meskipun usaha yang dijalankan nasabah mempunyai prospek yang bagus serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan profit, usaha tersebut haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Karena bisa saja hal tersebut didapatkan dari usaha yang dijalankan bertentangan dengan ketentuan syariaiah, atau usaha tersebut memperoleh profit dari melakukan perjudian dan menipu, yang tentu saja usaha tersebut dilarang dalam syariah Islam. Tentu saja usaha yang semacam itu tidak bisa mendapatkan pembiayaan *mudharabah* oleh bank.

Pihak bank terkadang sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakter dan dokumen informasi perusahaan dari calon nasabah pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini pihak bank harus memverifikasi tentang kebenaran dari data nasabah. Sebagai lembaga keuangan berbasis profit tentu bank tidak akan melakukan verifikasi dengan biaya tinggi, yaitu jika verifikasi tersebut hanya akan menghasilkan keuntungan yang sedikit bagi pihak bank, sehingga pihak BNI Syariah harus lebih selektif dalam manajemen biaya agar dapat memaksimalkan profit yang akan didapatkan.

Salah satu upaya verifikasi yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah dengan menghubungi orang terdekat dengan nasabah untuk dilakukan wawancara dan mengecek langsung usaha yang akan dibiayai oleh bank, wawancara ini dapat dilakukan secara langsung melakukan kunjungan langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui telepon. Wawancara yang dilakukan secara tidak langsung ini merupakan upaya dari BNI Syariah dalam meminimalkan biaya verifikasi, dikarenakan wawancara yang dilakukan melalui telepon tentu akan menggunakan biaya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan wawancara dengan kunjungan langsung kepada nasabah pembiayaan *mudharabah*. Dengan dilakukannya verifikasi oleh BNI Syariah, permasalahan yang tersebut diatas seperti sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya dapat diatasi, sehingga bank dapat memperoleh informasi-informasi terkait karakter dan usaha yang dijalankan nasabah dengan baik.

c. Kesalahan dalam Analisa

Kemudian masalah lainnya yang harus dihadapi oleh BNI Syariah adalah kesalahan dalam menganalisis kemampuan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Dimana tujuan dari analisis itu sendiri adalah untuk mengetahui kondisi usaha nasabah salah satunya dari segi finansial, untuk menentukan jumlah pembiayaan yang pantas dan wajar, serta untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pengembalian pembiayaan. Oleh sebab itu kesalahan dalam

menganalisis harus dihindari oleh pihak bank guna mendapatkan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang layak dan berkompeten. Pada dasarnya kesalahan bank dalam menganalisa pembiayaan tentu pernah terjadi, kesalahan yang materil maupun yang tidak materil. Untuk itu pihak BNI Syariah selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar kesalahan dalam menganalisis nasabah ini tidak berlanjut sampai ke tahap pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*.

Asymmetric information menyebabkan kesalahan analisa dari pengusul pembiayaan *mudharabah*. Jika kesalahan dalam menganalisa tidak disadari oleh pihak bank maka pada tahapan-tahapan pembiayaan *mudharabah* yang selanjutnya akan mengalami kesalahan pula. Namun kesalahan dalam menganalisa nasabah pada BNI Syariah tidak berlanjut sampai kepada proses pencairan sehingga tidak menyebabkan kerugian pada bank. Hal seperti ini harus selalu diwaspadai agar tidak berlanjut sampai kepada berlangsungnya pembiayaan *mudharabah* guna menghindari potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa dari tahun 2015 terdapat sebanyak 38% nasabah yang tidak memenuhi syarat sehingga gagal mendapatkan pembiayaan dari BNI Syariah. Dikarenakan tingginya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, sejak tahun 2015 pihak BNI Syariah mencoba mengurangi portofolio di Pembiayaan *Linkage Program*. Bahkan saat ini BNI Syariah KC Tanjung Karang tidak lagi menyalurkan pembiayaan pada sektor *linkage program*. Namun bukan

berarti BNI Syariah tidak akan ekspansi ke sektor *linkage program*, hanya saja pihak bank akan lebih *aware* terhadap risiko-risiko yang akan muncul. Dan dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan terdapat nasabah yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan namun juga tidak banyak, dikarenakan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tidak banyak.¹²⁴

Berdasarkan permasalahan *adverse selection* yang telah dikemukakan di atas pihak BNI Syariah mengatasi nasabah yang memiliki karakteristik rendah, melakukan penyimpangan dan menyembunyian informasi adalah dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Yaitu dengan cara pihak bank selalu mengedepankan prinsip *prudential banking* dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

2. Moral Hazard pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Selain permasalahan *adverse selection* BNI Syariah KC Tanjung Karang juga dihadapkan dengan masalah *moral hazard*. *Moral hazard* merupakan jenis *asymmetric information* berupa tindakan. *Moral hazard* atau perilaku buruk adalah tindakan dari suatu nasabah pembiayaan yang akan menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Masalah *moral hazard* akan terjadi ketika pembiayaan *mudharabah* telah berjalan dimana nasabah telah mendapatkan pembiayaan oleh bank.

¹²⁴ Rudi Winanda, SME *Financing Head* BNI Syariah KC Tanjung Karang, Wawancara, Pada Tanggal 6 Februari 2018.

Pada penelitian sebelumnya dikemukakan bahwa penyebab dari munculnya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk terdorong melakukan *moral hazard*, serta tidak optimalnya sistem *monitoring*.¹²⁵

Dalam sebuah teori dikemukakan bahwa permasalahan *moral hazard* dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini *mudharib* akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil *mudharib* kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.¹²⁶ Berdasarkan teori tersebut dapat diartikan bahwa *moral hazard* akan terjadi ketika nasabah pembiayaan mengabaikan etika syariah dalam melakukan kerjasama. Sehingga nasabah akan melakukan tindakan-tindakan penyimpangan berupa *moral hazard*.

Dalam teori selanjutnya dikemukakan bahwa masalah utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Dimana akan adanya kekhawatiran dari bank terhadap penyalahgunaan penggunaan dana (*side streaming*) dimana nasabah tidak

¹²⁵ Andy Fathur Rahman, "Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*". (Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 114.

¹²⁶ Misnen Ardiansyah, *Op.Cit*, h. 264.

menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad.¹²⁷

a. Penyimpangan pada Etika dan Kontrak

Moral hazard adalah tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis. Permasalahan *moral hazard* yang dihadapi oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah kurangnya etika syariah dan penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*, penyimpangan ini dapat berupa kurangnya tanggung jawab dari nasabah yang tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini akan memunculkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, asas kehati-hatian, dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyelewengan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Permasalahan *moral hazard* selanjutnya dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dimana nasabah pembiayaan *mudharabah* akan memanipulasi data tentang jumlah profit yang dihasilkannya, data tersebut akan dinyatakan lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tindakan manipulasi yang dilakukan oleh nasabah semacam ini bertujuan agar tingkat bagi hasil nasabah kepada pihak bank menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

¹²⁷ Friyanto, "Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 2, September 2011, h. 116.

Sehingga nasabah pembiayaan *mudharabah* akan memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dari pada yang seharusnya didapatkan.

Pada permasalahan-permasalahan *moral hazard* yang telah disebutkan di atas, sejauh ini permasalahan tersebut belum terjadi pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut akan terjadi, sehingga BNI Syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi.

b. *Sidestreaming*

Bank tidak mungkin melakukan pengawasan terus-menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan. Hal ini menyebabkan nasabah merasa kurang mendapat pengawasan oleh bank sehingga kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik dan nasabah dimungkinkan akan melakukan penyimpangan dalam mengelola dana dan dalam menjalankan usahanya.

Hal lain yang menyebabkan timbulnya masalah *moral hazard* dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah karena adanya keterbatasan bank selaku penyedia dana yang tidak boleh ikut campur dalam usaha yang diajalankan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Bank hanya dapat melakukan pengawasan kepada nasabahnya karena bank hanya bertindak sebagai penyedia dana, yang kemudian akan memperoleh keuntungan nisbah bagi hasil dari pendapatan profit yang dihasilkan usaha tersebut. Sejalan dengan teori yang dikemukakan di

atas bahwa hal-hal seperti inilah yang dapat menyebabkan munculnya *moral hazard* pada BNI Syariah.

Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Winanda pada bagian SME *Financing Head* diperoleh informasi bahwa *Asymmetric information* yang terjadi di BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah tindakan pelanggaran terhadap pengelolaan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah satu nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan produk Pembiayaan *Linkage Program* yaitu Koperasi X (nama nasabah disamarkan atas kerahasiaan data bank).

Pada saat pembiayaan *mudharabah* telah berlangsung Koperasi X melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap akad pembiayaan *mudharabah*. Koperasi X menggunakan dana yang diberikan oleh pihak BNI Syariah tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad pembiayaan *mudharabah*. Pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi X adalah berbentuk *side streaming* yaitu dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tidak digunakan untuk kepentingan pembiayaan. Hal ini dapat dideteksi oleh pihak bank ketika terdapat data yang mencurigakan dari laporan keuangan Koperasi X. Bank membandingkan angka piutang dan utang pada laporan keuangan Koperasi X yang ternyata memiliki selisih yang cukup banyak. Namun pada laporan keuangan di tahun berikutnya selisih pada angka piutang dan utang pada laporan keuangan Koperasi

X kembali normal. hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dari pihak bank. Setelah pihak bank melakukan proses bertabayun dan mengecek kebenaran dari Koperasi X yang diduga melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana pembiayaan. Namun setelah Koperasi X diverifikasi telah melakukan pelanggaran, Koperasi X yang tidak bertanggung jawab lalu menghilang tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pembiayaan.¹²⁸

Tindakan yang dilakukan pihak BNI Syariah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi X tersebut adalah mengeksekusi jaminan dari Koperasi X. Jaminan tersebut berupa *cash collateral* sebesar 25% dari nilai pembiayaan dan jaminan dari aset tetap pengurus Koperasi X yaitu berupa rumah. Nilai dari dari jaminan tersebutlah yang digunakan oleh pihak BNI Syariah dalam mengcover kerugian akibat gagal bayar oleh Koperasi X.¹²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa permasalahan *moral hazard* yang terjadi di BNI Syariah disebabkan oleh rendahnya karakter nasabah yang mengabaikan etika syariah serta kurang berdampaknya proses *monitoring* yang dilakukan oleh pihak bank. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan nasabah pembiayaan *mudharabah* terdorong untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap kontrak perjanjian. Tindakan penyimpangan yang dilakukan nasabah pembiayaan adalah berupa *sidestreaming*, dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan

¹²⁸ Rudi Winanda, *Op. Cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

yang telah disepakati pada awal perjanjian yaitu untuk kepentingan pembiayaan. Dalam hal ini apabila nasabah pembiayaan menerapkan etika syariah yang tinggi tentu tidak akan ada dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap dana pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah.

B. Dampak dari *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Permasalahan *asymmetric information* yang terjadi tentu akan menimbulkan berbagai macam efek negatif terhadap bank dan produk pembiayaannya. Dalam sebuah teori dikatakan bahwa informasi yang tidak sempurna dapat keliru menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hanya mengungkapkan sisi yang baik saja, sehingga menjadi penyebab kredit bermasalah, kredit yang seharusnya ditolak diputus setuju.¹³⁰ Sedangkan pada *moral hazard* akan membuat risiko dari pembiayaan sistem bagi hasil menjadi meningkat karena ketidakpastian (*uncertainty*) dan pendapatan yang rendah serta tidak menarik.¹³¹

Dampak negatif yang timbul akibat dari permasalahan *adverse selection* berupa penyembunyian informasi adalah bank tidak dapat mengetahui karakter yang sesungguhnya dari nasabah pembiayaan sehingga

¹³⁰ Iis Kurniasari Rivai, "Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, September 2013, h. 1141.

¹³¹ Salman Syed Ali, "Islamic Capital Market: Product, Regulation, and Developments". *Proceedings Paper of Internasional Conference, IRTI*, h. 241, dikutip oleh Andy Fathur Rahman, "Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*". (Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 5.

hal ini dapat berlanjut kepada kesalahan dalam menganalisa. Apabila kesalahan dalam menganalisa terjadi maka pembiayaan *mudharabah* pada tahapan selanjutnya akan mengalami kesalahan pula. Pada BNI Syariah kesalahan dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah* akan berdampak pada kekeliruan pihak komite pemutus dalam memutuskan pembiayaan *mudharabah*. Kemudian hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas pembiayaan menjadi tidak baik. Selanjutnya akan muncul risiko seperti gagal bayar. Tentunya hal-hal tersebut harus dihindari karena akan merugikan pihak bank itu sendiri.¹³²

Permasalahan *adverse selection* tidak memberikan dampak yang berarti. Dikarenakan permasalahan ini terjadi sebelum berlangsungnya akad pembiayaan *mudharabah*, sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian pada bank. Namun Apabila kesalahan-kesalahan seperti yang tersebut di atas tidak terdeteksi oleh pihak bank dan terus berlanjut pada tahapan pencairan dana hingga berlangsungnya akad *mudharabah* maka hal ini dapat memunculkan risiko gagal bayar.

Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku *moral hazard* berupa tindakan penyimpangan pengelolaan dana akan berdampak pada tingkat bagi hasil yang didapat oleh bank dari usaha tersebut tidak akan sesuai dengan yang telah diprediksikan bank sebelumnya. Sehingga dari permasalahan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan pada tahun-tahun selanjutnya

¹³²M. Farisal, SME Account Officer BNI Syariah KC Tanjung Karang, Wawancara, pada Tanggal 22 Februari 2018.

nasabah pada pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penyusutan, hal ini disebabkan tingginya risiko pada pembiayaan berakad *mudharabah* dengan pengembalian keuntungan yang tidak pasti serta kurangnya informasi yang didapatkan salah satu pihak dalam hal ini bank BNI Syariah selaku penyedia dana (*shahibul maal*).

C. Penanganan *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan selalu berisiko terhadap permasalahan *asymmetric information*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tingkat risiko yang ditanggung antara nasabah dan pihak bank, keduanya akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dari usahanya masing-masing.

Untuk dapat menekan permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* maupun *moral hazard* pihak BNI Syariah perlu melakukan penanganan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan *asymmetric information* agar dapat ditekan sehingga kemungkinan untuk terjadi lagi adalah kecil.

1. *Screening*

Berdasarkan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada kontrak *mudharabah* dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka pihak bank syariah – sebagai *principal* – perlu melakukan upaya-upaya pencegahan (*adverse selection*)

melaui: *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek; membuat kontrak yang lengkap (*complete contract*), misalnya tentang: jangka waktu, nisbah bagi hasil dan jaminan.¹³³

Agar tidak terjadi *adverse selection* maka BNI Syariah melakukan proses *screening*. *Sreening* merupakan bagian dari proses analisa yang dilakukan pada awal prosedur pembiayaan *mudharabah*. Proses ini dilakukan guna melihat dan menilai karakter sesungguhnya dari calon nasabah serta informasi-informasi lainnya untuk kepentingan pembiayaan *mudharabah* yang kemudian akan di analisis melalui dokumen yang diajukan oleh nasabah. Apabila BNI Syariah berminat untuk membiayai nasabah tersebut maka BNI Syariah selanjutnya akan melakukan *screening* secara lebih mendalam yaitu dengan melakukan penilaian pada kemampuan bisnis yang dimiliki nasabah, *transparancy*, profesionalisme, *akuntability*, tanggung jawab nasabah, dan potensi konflik yang bisa saja terjadi antar sesama karyawan.

¹³³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 169.

2. Verifikasi

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik keagenan yaitu, majikan memiliki segala informasi yang diperlukan untuk memverifikasi tingkah laku agen.¹³⁴ Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* khususnya *moral hazard* adalah perlunya dilakukan *monitoring* dan verifikasi atas upaya *mudharib*.¹³⁵

Dalam upayanya mengatasi permasalahan *asymmetric information* pihak BNI Syariah harus melakukan verifikasi data yang diberikan oleh nasabah. Kegiatan verifikasi ini harus dilakukan dalam kaitannya dengan proses yang harus dilakukan pada saat pengusulan pembiayaan. Dikarenakan untuk menekan pembiayaan macet dikemudian hari. Dalam hal ini apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, kemudian ketika diaudit orang yang melakukan proses audit ternyata belum melakukan verifikasi, maka kesalahan ada pada orang yang membuat pengusulan pembiayaan tersebut.¹³⁶

Dari informasi di atas dapat dilihat bahwa proses verifikasi sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan verifikasi ini dilakukan guna memastikan data yang telah diberikan oleh nasabah valid ataukah tidak, yaitu dalam artian data tersebut dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat dilakukan BNI Syariah secara langsung ataupun tidak langsung.

¹³⁴ Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 293.

¹³⁵ Misnen Ardiansyah, *Op. Cit*, h. 263.

¹³⁶ M Farisal, *Op. Cit*.

Verifikasi secara langsung dapat dilakukan dengan kunjungan langsung sekaligus silaturahmi kepada nasabah. Jika verifikasi informasi terkait dengan suatu lembaga atau badan hukum, maka yang akan diperiksa adalah jajaran direktur komisaris dari lembaga tersebut. Bank akan menilai tentang profesionalitas lembaga tersebut. Kemudian bank akan melakukan verifikasi dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (direktur, pengurus, dan dewan komisaris). Dalam kunjungan langsung ini pihak bank juga akan memverifikasi kebenaran dari data keuangan nasabah, misalnya dengan melihat persediaan nasabah sesuai atau tidak dengan yang dicantumkan pada data keuangan nasabah.

Verifikasi secara tidak langsung dapat dilakukan BNI Syariah dengan cara menelpon *end user*. Kemudian pihak bank akan mencari tahu apakah *end user* masih menjalankan pembiayaan dengan lembaga keuangan tersebut ataukah tidak. Hal tersebut dilakukan pihak bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya (LKS), masih tersalurkan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini jumlah *end user* yang akan diverifikasi dan *dimonitoring* oleh pihak bank adalah sebanyak 30% dari daftar nominatif agar informasi yang akan diperoleh bank akan lebih valid. Kemudian bank akan menilai karakter nasabah dengan melihat *database* yang diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdapat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).¹³⁷

¹³⁷ Andin Dwi Y, *Op. Cit.*

Cara lain yang dapat dilakukan dalam melakukan verifikasi pada nasabah pembiayaan *mudharabah* tanpa melalui pengecekan pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, adalah dengan menanyakan informasi terkait lembaga keuangan tersebut dengan kompetitornya. Karena pihak kompetitor akan memberikan informasi secara lebih terbuka dan jujur tanpa harus ada yang ditutupi ataupun disembunyikan. Hal ini dikarenakan pihak kompetitor lebih mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan terkait kondisi dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut.

3. *Monitoring*

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya permasalahan *asymmetric information* dapat diatasi dengan cara melakukan *monitoring*. *Monitoring* merupakan suatu bentuk peringatan dini (*earling warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur/*mudharib* dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit/. Adanya kontrol dan *monitoring* diperlukan sebagai upaya pengamanan yang diberikan oleh bank dengan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tindakan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya akad pembiayaan *mudharabah* yang telah ditetapkan pada awal perjanjian akad

serta memberikan saran dan konsultasi agar usaha yang dijalankan oleh nasabah berjalan dengan baik.¹³⁸

Upaya penanganan pada masalah *asymmetric information* yang dapat dilakukan oleh BNI Syariah selanjutnya adalah dengan melakukan *monitoring* yang dilakukan secara berkala tergantung pada tingkat risiko yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Kemudian bank juga akan menetapkan konvenan-konvenan kepada nasabah untuk memperkecil risiko *asymmetric information*.¹³⁹

Dari informasi di atas dapat dilihat bahwa upaya penanganan *asymmetric information* yang dilakukan oleh BNI Syariah dengan melakukan *monitoring* adalah sejalan dengan teori yang telah dikemukakan di atas. *Monitoring* yang dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai upaya pengamanan yang diberikan kepada nasabahnya dengan terus melakukan kontrol dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rudi Winanda pada bagian SME *Financing Head*, diperoleh informasi bahwa *monitoring* yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah akan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu:

- a. Apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* dianggap memiliki risiko kecil maka *monitoring* akan dilakukan per 6 bulan sekali.

¹³⁸ Friyanto, *Op. Cit.*, h. 177.

¹³⁹ Rudi Winanda, *Op. Cit.*

- b. Apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* dianggap memiliki risiko sedang maka monitoring akan dilakukan per 3 bulan sekali.
- c. Apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* dianggap memiliki risiko cukup tinggi maka monitoring akan dilakukan setiap bulan.

Sejalan dengan teori yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam melakukan *monitoring* biasanya pihak BNI Syariah akan melakukan *monitoring* secara langsung dan tidak langsung. *Monitoring* secara langsung yaitu BNI Syariah akan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana dan usaha dengan mendatangi para nasabahnya secara langsung ke lokasi perusahaan, namun dikarenakan *monitoring* secara langsung akan memakan biaya yang relatif besar maka BNI Syariah dapat meminimalkan biaya *monitoring* dengan melakukan *monitoring* secara tidak langsung.

Monitoring yang dilakukan yaitu dengan meminta rekonsiliasi daftar nominatif *end user*. BNI Syariah juga akan meminta pihak nasabah untuk melaporkan secara berkala dana pembiayaan yang diberikan pihak bank. Pada waktu *monitoring* yang telah ditetapkan pihak bank tiba maka bank akan meminta *update* data *end user* dan akan dilihat apakah *end user* tersebut masih melangsungkan pembiayaan dengan lembaga keuangan tersebut atau tidak. Kemudian bank akan terus melakukan pemantauan apakah dana yang diberikan oleh bank tetap digunakan untuk kepentingan usaha ataukah untuk hal-hal yang lain, hal ini dilakukan pihak bank untuk meminimalkan terjadinya tindakan penyimpangan berupa *side streaming*.

Penanganan masalah *asymmetric information* yang dilakukan dengan cara *monitoring* pada BNI Syariah merupakan tindakan yang paling efektif, dikarenakan dampak penerapannya yang berhasil menekan masalah *asymmetric information*, yaitu dilihat dari tindakan penyimpangan yang pernah terjadi hingga saat ini hanya satu permasalahan berupa *sidestreaming*. Diharapkan untuk kedepannya BNI Syariah dapat terus mengoptimalkan *monitoring*, sehingga akan semakin kecil kemungkinan untuk terjadi *asymmetric information*.

4. Penerapan Etika Syariah

Secara teori permasalahan *asymmetric information* juga dapat diatasi dengan prinsip-prinsip agama yang dapat digunakan sebagai pengendali diri agar seseorang tidak berbuat bohong (*hazard*), tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hail usaha yang diperoleh. Hal tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak *mudharabah* dapat menjalnkannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan *moral hazard*.¹⁴⁰

Prinsip-prinsip syariah yang menekankan kepada etika syariah dapat digunakan dalam mengendalikan diri agar nasabah tidak melakukan tindakan penyimpangan dengan tetap amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank, serta tetap jujur dalam melaporkan hasil usahanya kepada pihak bank. Hal inilah yang membedakan perbankan

¹⁴⁰ Muhammad, "Penyesuaian Masalah Agensi (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah*". *Jurnal Unisia UII* (Yogyakarta; 2009), h. 3.

syariah dan konvensional yaitu diberlakukannya etika dan prinsip-prinsip agama yang akan membatasi nasabah dalam melakukan tindakan penyimpangan. Yang kemudian akan mengendalikan perilaku nasabah sehingga mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan.

Pada dasarnya prinsip-prinsip agama yang lebih menekankan pada etika dan moral ini tentu sudah diterapkan pada bank yang berbasis syariah di Indonesia termasuk BNI Syariah KC Tanjung Karang, namun dalam penerapannya pada nasabah pembiayaan *mudharabah*, dampaknya belum terlalu berpengaruh dalam menekan permasalahan *asymmetric information*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian analisis *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya dengan obyek penelitian PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang:

1. *Asymmetric information* yang terjadi pada BNI Syariah berupa *advers selection* dan *moral hazard*. *Advers selection* pada BNI Syariah terjadi sebelum berlangsungnya akad pembiayaan *mudharabah*, masalah yang terjadi yaitu: penyembunyian informasi atas usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam menganalisa calon nasabah. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan pihak bank, dimana nasabah lebih mengetahui tentang kondisi usahanya sedangkan bank hanya mengandalkan informasi pada data yang diberikan nasabah dan proses verifikasi. *Moral hazard* yang terjadi pada BNI Syariah adalah berupa *sidestreaming*, dimana nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank tidak sesuai dengan perjanjian, seharusnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh

lemahnya pengawasan dari pihak bank dan kurangnya etika syariah dari nasabah.

2. *Asymmetric information* pada BNI Syariah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pada permasalahan *adverse selection* akan berdampak pada kekeliruan komite pemutus dalam memutus pembiayaan, sehingga apabila berlanjut akan berpotensi munculnya risiko gagal bayar. Sedangkan pada permasalahan *moral hazard* akan menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan pada tahun-tahun selanjutnya nasabah pada pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penyusutan.
3. Penanganan terhadap permasalahan *asymmetric information* ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, melakukan *screening* yang optimal pada proses awal pembiayaan *mudharabah*. Kedua, melakukan verifikasi secara langsung maupun tidak langsung guna memastikan data yang diberikan oleh nasabah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga, melakukan *monitoring* secara berkala sebagai upaya pengamanan yang diberikan kepada nasabahnya dengan terus melakukan kontrol dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan oleh nasabah. Di antara penanganan yang dilakukan oleh pihak bank, melakukan *monitoring* secara optimal adalah yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan *asymmetric information*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan dari penelitian analisis *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya penulis akan menyampaikan beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

1. Upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam mengatasi permasalahan *asymmetric information* sudah baik, namun dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* BNI Syariah harus lebih optimal lagi dalam memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), terutama dalam menilai karakter calon nasabah. Lalu melakukan *monitoring* yang lebih intensif kepada nasabah. Serta pihak bank harus lebih mengenal nasabah pembiayaannya dengan tetap menjaga hubungan *relationship* dengan nasabah.
2. Menjalankan prinsip-prinsip agama dengan lebih menekankan kepada moral dan etika-etika syariah sebagai pengendali diri, agar dalam menjalankan kontrak pembiayaan nasabah tetap dapat menjaga sikapnya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Arsip Dokumen PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung, 2017.
- Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fahmi Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Frederic S. Miskhin. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Hendy Herijanto. *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Sukabumi; Yayasan At-Tartil.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- _____. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- _____. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta; Salemba Empat, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Apek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

B. KARYA ILMIAH:

Andy Fatur Rahman, *Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah*. Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

Asfi Manziliati. *Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah Dalam Kerangka Teori Keagenan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 15 No. 2, Mei 2011.

Aswadi Lubis. *Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al Qalam. Vol. 33 No. 1, Januari-Juni 2016.

Firdaweri. *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 2, Juli 2014.

- Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 15 No. 2, September 2013.
- Iis Kurniasari Rivai, *Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 1 No. 3, September 2013.
- Mahmudatus Sa'diyah, dan Meuthiya Athifa Arifin. *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 2, Desember 2013.
- Mariska Dewi Anggraeni. *Agency Theory dalam Perspektif Islam*. Jurnal. Vol. 9 No. 2, Desember 2011.
- Michael C. Jensen, and William H. Meckling, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structur*. Journal of Financial Economic, Vol. 3 No. 4.
- Misnen Ardiansyah. *Bayang-bayang Teori Keagenan pada Kontrak Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal wawancara Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 14 No. 2, Desember 2014.
- Muhammad. *Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah*. Jurnal Unisia UII, Yogyakarta: 2009.
- Mujar Ibnu Syarif. *Konsep Riba Dalam Al Qur'an dan Literatur Fikih*. Jurnal Islamic of Economics. Vol. III, No. 2, Juli 2011.
- Refaat Zharfan. *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal Agent dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar*. Skripsi Program Strata Satu Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar: 2012.
- Salman Syed Ali. *Islamic Capital Market: Product, Regulation, and Developments*. Proceedings Paper of Internasional Conference. IRTI, 2008.
- Satia Nur Maharani. *Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 2 No. 3, September 2008.

Zaenal Arifin. *Pengaruh Asymmetric Information Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi*. Vol.9. No.2, Juni 2007.

C. KAMUS:

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

D. SUMBER LAIN:

Annual Report BNI Syariah. Part 2, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Website BNI Syariah (www.bnisyariah.go.id)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN
***MUDHARABAH* DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK BNI**
SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pembiayaan apa saja yang menggunakan akad *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
2. Apa yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
3. Karakteristik apa sajakah yang menjadi penilaian dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
4. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah KC Tanjung Karang?
5. Bagaimana proses *screening* yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*?

B. *Asymmetric Information*

1. Apakah bank benar-benar mengetahui kualitas kebenaran proposal pengajuan pembiayaan *mudharabah*?
2. Apakah ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan memperbagus data tentang kondisinya mereka yang sesungguhnya?
3. Apakah hal tersebut terjadi sebelum atau sesudah pembiayaan *mudharabah*?

4. Bagaimanakah kriteria permasalahan yang dianggap sebagai *asymmetric information* menurut BNI Syariah KC Tanjung Karang?
5. Bagaimana permasalahan *asymmetric information* dapat terjadi pada pembiayaan *mudharabah*?
6. Apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *asymmetric information* yang terjadi di BNI Syariah KC Tanjung Karang?

C. Monitoring (Pengawasan)

1. Apakah penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah dapat diketahui dengan jelas oleh bank?
2. Bagaimana biaya monitoring yang terjadi?
3. Bagaimana ketentuan sistem *monitoring* yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan bank dalam memantau pengelolaan modal dan informasi keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah*?

D. Penanganan *Asymmetric Information*

1. Bagaimana cara BNI Syariah KC Tanjung Karang menekan atau meminimalisir terjadinya permasalahan *asymmetric information*?
2. Bagaimana cara penanganan terhadap permasalahan *asymmetric information* yang telah terjadi di BNI Syariah KC Tanjung Karang?

Lampiran 5



